

BAB IV

ALASAN KEGAGALAN PBB

A. Lemahnya Tekanan PBB karena Pecahnya Dewan Keamanan

1. Cina Menentang PBB

Usaha-usaha yang dilakukan PBB untuk menangani HAM di Myanmar kurang dapat berjalan baik dan PBB tidak dapat mengubah kebijakan di Myanmar. Segala tindakan Junta Militer yang berani mengambil keputusan didasarkan pada perlindungan yang diberikan oleh Cina. China yang banyak membeli kayu dan hasil tambang Myanmar menolak sikap dan tekanan yang dilakukan Barat agar Myanmar melakukan perubahan politik. Cina telah menyerukan kepada dunia agar menghormati kebijakan domestik Myanmar. Oleh sebab itu, pada Januari 2007 Cina memveto resolusi PBB yang meminta junta menghentikan penindasan terhadap minoritas dan oposisi Myanmar.

Hal tersebut merupakan pertanda pecahnya suara dalam Dewan Keamanan PBB. Apapun tindakan dunia internasional, yang dalam hal ini terdapat juga peranan PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran HAM kepada Myanmar, tidak dapat berjalan efektif. Setiap resolusi PBB untuk menghukum Junta Militer akan dapat dipastikan mendapat veto dari Cina yang bertindak sebagai anggota Dewan

Resolusi yang PBB buat untuk menghukum Junta Militer tidak pernah berhasil karena Cina selalu melakukan veto terhadap resolusi tersebut. Cina sebagai salah satu negara yang bertindak sebagai anggota Dewan Keamanan PBB tentu saja dianggap sah untuk melakukan veto karena hak veto hanya dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Selama Cina terus melakukan veto maka masyarakat internasional dalam hal ini PBB tidak dapat menekan Junta Militer untuk menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar. Pecahnya suara dalam Dewan Keamanan PBB diindikasikan bahwa adanya kepentingan dalam negeri Cina sendiri, ditandai dengan terjalinnya hubungan baik antara Cina dengan Pemerintah Junta Militer Myanmar.

2. Hubungan Cina dengan Myanmar

a. Kedekatan Cina dengan Myanmar

Myanmar merupakan negara tetangga dari dua negara besar yaitu Republik Rakyat Cina (RRC) dan India yang secara tidak langsung berpengaruh pada posisi Myanmar di kawasan. China memang dikenal sebagai mitra dagang terbesar dan pelindung junta militer. China sejauh ini menjual senjata bernilai jutaan dollar AS kepada Myanmar. China juga meningkatkan fasilitas pangkalan AL Myanmar.

Sudah sejak tahun 1950-an Cina mendambakan cara menerobos rintangan perdagangan yang menutup akses Propinsi Yunnan dan Sichuan ke Asia Tenggara dan Samudera Hindia. Hal ini disebabkan oleh akses tersebut dikuasai Partai Komunis Burma yang menentang pemerintah sah di Yangoon dan didukung Cina

Namun para pemberontak komunis itu terpecah karena alasan etnis, ditambah adanya reformasi, terbukalah pintu bagi Cina bersahabat dengan rezim militer Myanmar.⁵⁶

Kesempatan baik yang menjadi peluang Cina untuk dapat melakukan hubungan kerjasama dimanfaatkan oleh pemerintah Cina dan merupakan langkah awal proses pendekatan dengan Myanmar. Cina selanjutnya mempersiapkan tindakan dan sikap untuk menjalin hubungan baik dengan Junta Militer. Cina selanjutnya melaksanakan rencananya untuk menjalin hubungan baik dengan Junta Militer sehingga sejak tanggal 6 Agustus 1988, Myanmar telah berubah menjadi sekutu Cina, baik secara strategis maupun ekonomis.

Tercapainya usaha Cina menjalin kerjasama ekonomi dengan Myanmar adalah dengan terealisasinya penandatanganan perjanjian dagang lintas batas antara kedua negara. Kedua negara tersebut melakukan kesepakatan kerjasama bidang ekonomi. Sudah sejak 1950-an Cina mendambakan cara menerobos rintangan perdagangan yang menutup akses Propinsi Yunnan dan Sichuan ke Asia Tenggara dan Samudera Hindia. Sebab selama itu akses itu dikuasai Partai Komunis Birma yang menentang pemerintah sah di Yangoon dan didukung Cina. Namun para pemberontak komunis itu terpecah karena alasan etnis, ditambah adanya reformasi, terbukalah pintu bagi RRC bersahabat dengan rezim militer Myanmar.⁵⁷

⁵⁶ "China tak akan Membiarkan Demokrasi Tegak di Burma," dalam <http://www.mail-archive.com/mabindo@yahoogroups.com/msg04578.html>, diakses tanggal 11 Oktober 2011.

⁵⁷ "Ulah Myanmar. Negara Klien Cina." dalam

Pada waktu penandatanganan perjanjian dagang tersebut dilakukan, keadaan Myanmar dalam kondisi banyak "kerusuhan" karena rakyat Myanmar menentang Junta Militer. Cina tidak mepedulikan keadaan masyarakat Myanmar karena bagi Cina yang terpenting adalah terjalin hubungan baik antara Cina dengan pemerintah Myanmar. Hubungan baik antara Cina dengan Junta Militer sebagai pemimpin pemerintahan Myanmar membuat Cina tidak mampu menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar.⁵⁸

Rakyat Myanmar yang mengalami penderitaan berharap pemerintah Cina akan membantu menekan Junta Militer. Hal ini membuat rakyat Myanmar dua hari setelah perjanjian kerjasama antara Cina dan Myanmar terjadi, tepatnya tanggal 8 Agustus 1988 melakukan demonstrasi.⁵⁹ Demonstrasi tersebut dilakukan jutaan orang di Myanmar untuk menuntut pemulihan hak-hak sipil dan meminta Cina untuk tidak melanjutkan kerjasama ekonomi dengan Myanmar jika pelanggaran HAM terus terjadi.

Cina tidak menanggapi. Hubungan Cina dan Junta Militer semakin membaik dan dipererat dengan adanya perjanjian kerjasama yang semakin luas dalam bidang perdagangan antara kedua negara tersebut. Pada dasawarsa 1900an, disepakati perjanjian perdagangan yang lebih luas dan sejak saat itu, Cina memang dikenal sebagai mitra dagang terbesar bagi Myanmar. Sejumlah hasil bumi dari Myanmar

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ "Mengapa Junta Militer Burma Bisa Bertahan Lama Di Panggung Kekuasaan," dalam

menjadi produk ekspor negara Myanmar yang di impor oleh Cina. Diantara beberapa hasil bumi Myanmar, yang merupakan barang ekspor Myanmar yang utama adalah kayu. Selain itu, banyak juga hasil alam lainnya yang menjadi barang ekspor Myanmar.

Hasil tambang dari Myanmar yang berupa gas alam merupakan barang yang di impor Cina yang merupakan salah produk dalam perjanjian perdagangan yang telah disepakati. Hingga saat ini, hubungan perdagangan berjalan dengan baik. Hubungan kerjasama tersebut membuat kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari kerjasama yang disepakati.

Perjanjian kerjasama yang disepakati oleh Cina dan Myanmar juga di sempurnakan dengan dokumen yang ditandatangani bersama untuk saling memberikan informasi intelijen. Bukan hanya Cina yang mendapat keuntungan dari Myanmar, tetapi Myanmar pun memperoleh keuntungan dengan adanya kelengkapan persenjataan yang di beli oleh Myanmar dari Cina. Persenjataan tersebut merupakan buatan Amerika, dan karena hubungan dagang yang baik antara Myanmar dan Cina, memudahkan Myanmar untuk mendapatkan senjata dari AS tersebut.

Hubungan perdagangan yang terjalin antara Cina dan Myanmar sangat mempengaruhi perekonomian di kedua negara. Neraca dagang Myanmar dan Cina mencapai angka US\$ 1.70 dan realitanya, China memang telah memberi kontribusi besar kepada Myanmar dalam banyak hal baik dalam bidang ekonomi militer

bahkan ideologi dan politik Myanmar. Peningkatan neraca dagang antara Myanmar dengan Cina dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Neraca Dagang antara Myanmar dengan Cina

Tahun	Nilai
2006	US\$ 1.57
2007	US\$ 1.61
2008	US\$ 1.64
2009	US\$ 1.70

Sumber: "Sikap Politik terhadap Junta Militer Myanmar," dalam http://www.gmnisurabaya.org/sikap_politik_terhadap_junta_militer_myanmar/, diakses tanggal 11 Oktober 2011.

Peningkatan neraca dagang antara Myanmar dengan Cina menunjukkan bahwa hubungan kedua negara semakin lama semakin baik. Keuntungan yang didapat membuat kedua negara sama-sama berusaha untuk terus menjalin kerjasama. Hubungan perdagangan yang semakin luas membuat Myanmar dan Cina telah membuat kesepakatan yang berkaitan dengan pengadaan gas alam. Myanmar terikat kontrak 20 tahun dengan Cina untuk menyediakan gas alam. Cina merupakan negara di dunia yang paling membutuhkan minyak dan gas.⁶⁰ Perbandingan negara-negara yang menjadi konsumen energi terbesar dunia tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini:

⁶⁰ "Sikap Politik terhadap Junta Militer Myanmar," dalam http://www.gmnisurabaya.org/sikap_politik_terhadap_junta_militer_myanmar/, diakses tanggal 11

Tabel 4.2
Komposisi Sumber Energi dari 10 Negara Konsumen
Energi Terbesar Dunia

No	Negara	Minyak	Gas Alam	Batu bara	Energi Nuklir	Hidro Elektrik	Total	%
1	Amerika Serikat	937.6	582.0	584.3	187.9	59.8	2331.6	22.80
2	Cina	308.6	35.1	956.9	11.3	74.2	1386.2	13.60
3	Federasi Rusia	128.5	361.8	105.9	32.4	40.0	668.6	6.50
4	Jepang	241.5	64.9	120.8	64.8	22.6	514.6	5.00
5	India	119.3	28.9	204.8	3.8	19.0	375.8	3.70
6	Jerman	123.6	77.3	85.7	37.8	6.1	330.4	3.20
7	Kanada	99.6	80.5	30.5	20.5	76.4	307.5	3
8	Prancis	94.0	40.2	12.5	101.4	14.8	262.9	2.60
9	Kerajaan Inggris	80.8	88.2	38.1	18.1	1.7	226.9	2.20
10	Korea Selatan	104.8	28.4	53.1	29.6	1.3	217.2	2.10

Sumber: BP Statistical Review of World Energy 2010

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Cina membutuhkan sumber energi minyak paling banyak kedua di dunia. Cina juga negara kedelapan di dunia yang paling besar mengkonsumsi gas. Kebutuhan Cina terhadap minyak yang cukup banyak membuat Cina harus melakukan hubungan yang baik dengan negara-negara penghasil gas salah satunya adalah Myanmar.

Sementara itu, Myanmar pun berusaha mendapat keuntungan dari China dimana China mengekspor senjata, peluncur roket, tank, dan lain-lain ke Myanmar.

Dembangunan infrastruktur di Myanmar juga berjalan dengan lancar atas dukungan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Cina dengan Junta Militer berlangsung dengan baik. Semakin luasnya kerjasama yang dilakukan China dan Junta Militer menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama diuntungkan dengan adanya kerjasama tersebut dan sama-sama berusaha untuk memberikan dukungan.

b. Dukungan China terhadap Myanmar

Negara Myanmar merupakan suatu negara yang mendapatkan simpati dari banyak negara besar di dunia karena kekayaan alam yang ada di Myanmar. Keadaan Myanmar yang diwarnai pemberontakan terhadap pemerintahan Junta Militer mendapatkan dukungan penuh dari China sehingga pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar belum dapat di hentikan. Salah satu sikap tegas yang dilakukan Junta Militer terhadap para penentang pemerintahan Junta Militer adalah dengan memenjarakan puteri pejuang kemerdekaan Birma Aung San.

Sikap Junta Militer itu dikarenakan, China memberikan dukungan penuh di belakang Myanmar. China yang banyak membeli kayu dan hasil tambang Myanmar menolak sikap dan tekanan yang dilakukan Barat agar Myanmar melakukan perubahan politik. Membiarkan status quo di Myanmar adalah demi kepentingan ekonomi China.

Padahal berbagai tekanan dan sanksi dunia internasional sudah dilakukan. Kasus HAM yang terjadi di Myanmar mendapat kecaman dari dunia internasional,

memberhentikan pelanggaran HAM. Namun, kenyataan yang terjadi, para penguasa China yang memberikan dukungan terhadap Myanmar membuat pemerintah militer itu masih berdiri kuat.⁶¹

Keberanian Myanmar dalam melaksanakan pelanggaran HAM tidak lain dikarenakan adanya dukungan dari pemerintahan China. China bukan hanya menjadi peyumbang penting ekonomi bagi Junta militer, tetapi juga telah menjadi pelindung politik bagi Junta militer. Hingga saat ini, nampaknya China memilih mendukung Junta Militer Myanmar daripada melakukan tekanan terhadap Junta Militer. Selama ini kekuatan Junta Militer baik didalam negeri maupun di dunia Internasional adalah karena mendapat perlindungan dan dukungan Cina.

Dukungan Cina tidak saja didasari oleh kepentingan ekonomi sebagai jalur perdagangan Cina, namun juga karena kekayaan alam yang dimiliki Myanmar. Cina juga memiliki kepentingan politik untuk menggunakan Myanmar sebagai pengaruh yang signifikan secara geografis, disamping untuk menjangkau samudera Hindia juga mengimbangi saingan dagang lainnya seperti Amerika, Jepang, dan India.

Dukungan yang diberikan Cina terhadap Myanmar adalah dukungan persenjataan. Berikut merupakan persenjataan yang diperoleh Myanmar dari Cina:

⁶¹ "Ulah Myanmar, Negara Klient Cina," dalam

Tabel 4.3
Persenjataan yang Diperoleh Junta Militer dari Cina

Persenjataan	Jumlah
Senapan	215 buah
Tank perang	28 buah

Sumber: "PBB Desak Myanmar Akhiri Pelanggaran HAM," dalam http://www.kapanlagi.com/h/0000091385_print.html, diakses tanggal 11 Oktober 2011.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Cina mendukung persenjataan Junta Militer. Adanya hubungan baik antar kedua negara membawa keuntungan ekonomis maupun politik. Secara ekonomi tentu saja pendapat kedua negara semakin meningkat, sedangkan secara politik~keuntungan diperoleh Junta Militer karena Cina secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada Junta Militer.

Sementara itu, di sisi lain Cina juga menilai Myanmar sebagai negara pendukung politik strategisnya di kawasan dimana hubungan kedua negara cukup harmonis bahkan, Cina telah menyatakan dukungan penuhnya terhadap pemerintahan junta militer Myanmar dan menentang perubahan struktur pemerintahan negara tersebut, apalagi jika perubahan yang dimaksud adalah sistem pemerintahan demokratik ala Amerika Serikat.

Penandatanganan perjanjian perdagangan antara Cina dan Myanmar diimbangi dengan bantuan militer yang diberikan Cina terhadap Myanmar. Menurut

perkembangan dalam desawarsa 1990an saja Cina menyanakan bantuan militer sebagai

US\$1,2 milyar terhadap Myanmar. Bantuan militer tersebut berupa senjata ringan dan berat, tank dan kendaraan pengangkut personel, pesawat tempur, kapal perang, penyapu ranjau, dan kapal peronda pantai bersenjatakan peluru kendali.⁶² Perjanjian kedua negara itu dirancang dengan dokumen yang ditandatangani bersama untuk saling memberikan informasi intelijen.

Adanya dukungan militer dan ekonomi dari Cina tersebut membuat Junta Militer Myanmar mampu leluasa menindas kekuatan demokrasi, termasuk melakukan pelanggaran HAM. Di balik dukungan Cina kepada rezim militer Myanmar, ada kepentingan politik dan strategis yang melatarbelakanginya.

Secara politik baik Junta Militer maupun Cina mempunyai kesamaan, keduanya tidak memberi peluang untuk tumbuhnya demokrasi. Apabila Cina mempunyai peristiwa penindasan Tiananmen 1989, Myanmar juga memiliki sejarah panjang dalam menekan tumbuhnya demokrasi. Apabila Cina mempunyai ikon demokrasi seperti Wei Jingsheng dan Fang Lizhi yang berhasil diusir ke luar negeri, serta ribuan tahanan politik yang di penjara, Myanmar punya Suu Kyi dan ribuan pengikutnya yang juga ditahanan didalam tahanan.

Selain dukungan ekonomi dan militer, Cina juga memberikan dukungan politik terhadap Junta Militer. Junta Militer mendapat tekanan dari PBB dengan adanya upaya PBB membuat resolusi PBB. Namun resolusi tersebut oleh Cina selalu ditolak. Cina memanfaatkan kedudukannya dalam anggota Dewan Keamanan PBB

yang memiliki hak veto. Resolusi tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB melakukan veto.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan Cina terhadap Junta Militer adalah di bidang ekonomi, militer, serta politik. Dukungan politik merupakan dukungan yang sangat berperan dalam menyebabkan dunia internasional tidak dapat menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar.

B. Kuatnya Rezim Militer Myanmar

1. Myanmar Memiliki Asas Partikular

Myanmar memiliki asas partikular sehingga sulit bagi PBB untuk menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar. Adanya deklarasi HAM yang dicetuskan PBB di atas mengandung makna ganda, baik keluar (antar bangsa) maupun ke dalam (intra negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negaranya masing-masing. Makna keluar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan antar negara bangsa agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan.

Myanmar memandang HAM bersifat partikular. HAM ada yang memandang bersifat universal (berlaku untuk di semua negara) dan partikular (nilai HAM sangat

kontekstual pada suatu negara).⁶³ Pandangan yang menolak universalitas HAM mengajukan beberapa alasan diantaranya: (a) bahwa Deklarasi Nasional Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengklaim diri sebagai universal itu hanya dibuat oleh beberapa negara yang dimotori oleh negara-negara yang menang perang dan menggambarkan nilai-nilai individualisme liberal masyarakat barat; (b) DUHAM tidak melihat kekhasan budaya yang terdiferensiasi berdasarkan budaya dan ruang geografik; serta (c) terdapat perbedaan pendekatan dalam melihat hak asasi manusia.⁶⁴ Myanmar memiliki dasar HAM yang kuat yaitu partikular. Kondisi ini menyebabkan sulitnya PBB untuk intervensi dalam menangani HAM di Myanmar.

Hubungan baik Pemerintah Junta Militer Myanmar dengan Pemerintah Cina yang terjalin kurang lebih dua dekade membuat adanya saling ketergantungan antara kedua belah pihak. Sejak tahun 1950-an Cina mendambakan cara menerobos rintangan perdagangan yang menutup akses Propinsi Yunnan dan Sichuan ke Asia Tenggara dan Samudera Hindia. Hal ini disebabkan oleh akses tersebut dikuasai Partai Komunis Burma yang menentang pemerintah sah di Yangoon dan didukung Cina. Namun para pemberontak komunis itu terpecah karena alasan etnis, ditambah adanya reformasi, terbukalah pintu bagi Cina bersahabat dengan rezim militer Myanmar. Kesempatan baik yang menjadi peluang Cina untuk dapat melakukan

⁶³ Achmad Fauzi, "Hak Asasi Manusia," dalam <http://coretcoretantugas.wordpress.com/2010/04/14/hak-asasi-manusia/>, diakses tanggal 4 Oktober 2011.

⁶⁴ Yance Arizona, "Positivisasi Hak Asasi Manusia," dalam <http://coretcoretantugas.wordpress.com/2010/04/14/positivisasi-hak-asasi-manusia/>, diakses tanggal 5

hubungan kerjasama dimanfaatkan oleh pemerintah Cina dan merupakan langkah awal proses pendekatan dengan Myanmar. Cina selanjutnya mempersiapkan tindakan dan sikap untuk menjalin hubungan baik dengan Junta Militer.

Secara politik baik Junta Militer maupun Cina mempunyai kesamaan, keduanya tidak memberi peluang untuk tumbuhnya demokrasi. Apabila Cina mempunyai peristiwa penindasan Tiananmen 1989, Myanmar juga memiliki sejarah panjang dalam menekan tumbuhnya demokrasi. Apabila Cina mempunyai ikon demokrasi seperti Wei Jingsheng dan Fang Lizhi yang berhasil diusir ke luar negeri, serta ribuan tahanan politik yang di penjara, Myanmar punya Suu Kyi dan ribuan pengikutnya yang juga ditahanan didalam tahanan. Cina menilai Myanmar sebagai negara pendukung politik strategisnya di kawasan dimana hubungan kedua negara cukup harmonis bahkan, Cina telah menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan junta militer Myanmar dan menentang perubahan struktur pemerintahan negara tersebut, apalagi jika perubahan yang dimaksud adalah sistem pemerintahan demokratik ala barat.

Sedangkan secara ekonomi dan militer, Cina dan Pemerintah Junta Militer juga mempunyai perjanjian yang saling menguntungkan. Dimana Cina membutuhkan sumber daya alam yang besar, dan Pemerintah Junta Militer meresponnya dengan mengekspor hasil bumi mereka diantaranya Gas Alam dan Kayu. Begitu juga

juga Cina memberikan timbal balik dengan melengkapi system persenjataan milik Pemerintah Junta Militer.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui, hal ini merupakan indikasi bahwa Pemerintahan Junta Militer Myanmar berprinsip Asas HAM yang bersifat partikular. Kedekatan hubungan Junta Militer dengan Cina membuat sedikit banyak memiliki kesamaan. Kesamaan yang paling menonjol adalah pandangan politik, dimana keduanya tidak membiarkan demokrasi bebas berkembang di negara masing-masing. Kedua negara tersebut sangat otoriter terhadap rakyatnya, kebebasan tidak diakomodasi secara luas, rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pendapat serta pemikirannya secara leluasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Cina yang merupakan negara berpaham Komunis, dimana paham tersebut sangat bertentangan dengan paham Liberal (penganut prinsip HAM yang bersifat universal) yang sangat terbuka dan memberikan kebebasan yang luas terhadap individu, penganut paham Liberal ini kebanyakan berasal dari negara-negara barat yang merupakan pemenang perang. Walaupun Pemerintah Junta Militer tidak menganut paham Komunis secara utuh, akan tetapi paham Komunis yang dianut oleh Cina memberikan pengaruh yang besar bagi Pemerintahan Junta Militer Myanmar. Terbukti dengan langgengnya kekuasaan Junta Militer hingga kurang lebih dua dekade semenjak hubungan dengan Cina mulai dibuka secara luas. Sehingga berpengaruh dari segi politik dan keamanan, Myanmar mendapatkan posisi yang aman dari ancaman politik dan keamanan yang mengancam kekuasaan Pemerintah

Junta Militer karena adanya dukungan dan perlindungan Cina yang mempunyai pengaruh besar dalam pergaulan internasional dan terlebih dalam internal PBB dimana Cina mempunyai Hak Veto karena masuk dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu Pemerintah Junta Militer berprinsip menggunakan paham HAM yang bersifat partikular.

2. Lemahnya “Civil Society” Myanmar terhadap Junta Militer

Rezim militer Myanmar menguasai panggung politik sejak kudeta militer tahun 1962. Rezim militer yang berkuasa saat ini yakni Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara (State Peace and Development Council) yang dulu bernama Dewan Pembinaan Tatahan dan Hukum (State Law and Order Restoration Council), memiliki anggota 19 Jenderal yang dipimpin oleh Jenderal Than Shwe, yang memerintah dengan tangan besi. Namun begitu sebenarnya Myanmar sempat mengalami era demokrasi meski berlangsung sejenak, yakni ketika partai politik pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi pemilu demokratis tahun 1990, namun dibatalkan sepihak oleh junta. Sejak saat itu praktis Myanmar dikendalikan secara otoriter oleh junta militer yang didukung sepenuhnya oleh Cina.

Cikal bakal junta militer yang saat ini dikenal dengan sebutan Dewan Negara untuk Perdamaian dan Pembangunan (SPDC) berasal dari kekuasaan Ne Win.⁶⁵ SPDC sendiri didominasi oleh etnis Burma. Konfigurasi kekuasaan hak pun menjadi

⁶⁵ “*Myanmar*” dalam *http://jurnalidj.uns.ac.id/2014/04/01/* diakses tanggal 1 Oktober 2014

tidak berimbang antara etnis Burma yang mendominasi dan etnis non-Burma yang merasa ditindas. Sehingga muncullah perlawanan dari beberapa etnis non-Burma, termasuk etnis Karen, yang mendominasi wilayah pegunungan di utara, yang dikenal sebagai *golden triangle* (segitiga emas).

Gejolak politik di Myanmar tidak dapat dihindari setelah ribuan biksu Budha memimpin demonstrasi anti kekerasan yang diikuti puluhan ribu warga ternyata direspons dengan kekerasan melalui tindak brutal oleh pihak penguasa militer sehingga menimbulkan korban yang tidak sedikit. Meskipun demikian, pihak junta menyebut korban tewas hanya dalam hitungan jari, tetapi pihak Barat memiliki data sebagaimana dilansir oleh Dubes Australia untuk Myanmar, Bob Davis dan Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown, bahwa jumlah korban tewas bisa mencapai puluhan bahkan ratusan orang.

Efeknya banyak rakyat yang menderita baik secara sosial ekonomi dan politik, kesenjangan begitu mencolok. Keadaan seperti inilah yang terjadi selama hampir empat puluh lima tahun lamanya di Myanmar. Tahun 1988 hampir 3.000 orang tak berdosa dibantai oleh Junta militer Myanmar, akan tetapi perlawanan terus berlanjut hingga sekarang. Selama kurun waktu itu pula kebebasan pers dibelenggu, media massa dimonopoli oleh Junta, sehingga akses informasi serta pemberitaan hanya menjadi satu arah dimana seolah oleh keberadaan di Myanmar hari ini tidak

Menurut Amnesty Internasional (AI) yang berbasis di London, warga minoritas Rohingya kerap dipaksa kerja sebagai buruh di jalan-jalan dan di kamp-kamp militer. "Mereka juga dibebani dengan berbagai bentuk pajak dan pembatasan di sektor keuangan dan perkawinan. Selain itu, tanah-tanah mereka dirampas dan rumah-rumah mereka dihancurkan," tulis AI dalam laporannya.⁶⁶

Tekanan juga dilakukan junta atas para penerbit surat kabar swasta. Media massa dipaksa tutup karena menolak menyiarkan propaganda militer. Sembilan surat kabar mingguan ditutup di Rangoon. Selain karena dipaksa militer, juga karena jaringan distribusi yang lumpuh akibat kerusakan. Kebrutalan militer Burma tak berhenti di situ. Selain merusak jaringan dan penyediaan warung internet, junta juga memerintahkan tentara untuk secara khusus memukul dan merampas siapa saja yang membawa kamera video atau telepon seluler (ponsel) berkamera di tengah aksi brutal tentara menghalau para pemrotes.

Kuatnya rezim junta militer juga terlihat dari tindakan junta pada 1989, dimana junta militer tanpa tanpa persetujuan rakyat Burma (yang semula bernama Union Burma) mengubah nama negeri ini menjadi Myanmar.

Arogansi junta militer Myanmar nampak pada Tatmadaw, sebutan militer Myanmar, selalu mengklaim dirinya sebagai institusi yang paling berjasa dalam memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan. Menonjolkan prestasinya menyelamatkan negara, yang nyaris tercabik-cabik oleh pemberontakan Partai

⁶⁶ "Derita Rohingya, Muslim Myanmar yang Terabaikan," dalam <http://www.alhikmahonline.com/content/view/full/226116/>, diakses tanggal 11 Oktober 2011

komunis Burma dan lebih dari 50 kelompok etnis sejak tahun 1950an. Di sisi lain sipil di nilai gagal, tidak pantas memimpin negara, karena konflik di tingkat elit politik.⁶⁷

Masyarakat Myanmar banyak yang tidak menyukai kepemimpinan Junta Militer. Namun pada kenyataannya lemahnya *civil society* Myanmar terhadap Junta Militer menyebabkan sulitnya PBB menangani HAM di Myanmar. Sejak Junta Militer berkuasa pada 1962, setidaknya ada tiga demonstrasi besar yang dilakukan aktivis pendukung pro demokrasi di Myanmar. Berikut merupakan demonstrasi yang dilakukan masyarakat Myanmar untuk menentang Junta Militer:

Tabel 4.4
Demonstrasi yang Dilakukan Masyarakat Myanmar
untuk Menentang Junta Militer

Tanggal	Kegiatan
8 Agustus 1988	Demonstrasi untuk menentang Myanmar yang dianggap masyarakat Myanmar bersikap otoriter.
7 Desember 1990	Demonstrasi untuk meminta Junta Militer mengakui kemenangan Aung San Suu Kyi dalam pemilu 1990
September 2007	Demonstrasi meminta Junta Militer mundur dari kepemimpinan Myanmar

Sumber: "PBB Desak Myanmar Akhiri Pelanggaran HAM," dalam http://www.kapanlagi.com/h/0000091385_print.html, diakses tanggal 11 Oktober 2011.

Pertama, aksi *up rising* pada 8 Agustus 1988 (dikenal dengan aksi 8888) diduga militer menewaskan 3.000 aktivis mahasiswa. Peristiwa 1988 baru tersiar

⁶⁷ " "Mengapa Junta Militer Burma Bisa Bertahan Lama Di Panggung Kekuasaan," dalam

dalam bentuk foto dan tayangan video setelah kejadian tersebut lama berlalu. Pada 1988, terjadi demonstrasi di Myanmar karena masyarakatnya menentang pemerintahan Junta Militer yang telah melakukan tindak kekerasan di Myanmar.

Kedua, usai partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi memenangkan secara mutlak pemilu 1990, Junta Militer menangkapi mahasiswa, aktivis, bahkan anggota parlemen terpilih. Ribuan aktivis dipenjara, banyak yang tewas dalam penjara yang kondisinya sangat buruk. Ketiga, aksi September 2007 yang dipelopori para biksu, menyusul kenaikan BBM sebesar 500 persen.

Peristiwa demo September 2007 oleh para biksu dan aktivis ditonton langsung oleh jutaan pemirsa di berbagai penjuru dunia. Para Biksu, aktivis yang tergabung dalam Generasi 88 serta masyarakat lain yang menjadi *citizen journalist* telah menoreh sejarah bahwa perlawanan rakyat Myanmar terhadap Junta Militer itu masih ada. Pada 8 Agustus 1988, para mahasiswa memimpin pemberontakan dan para biksu memberikan dukungan.⁶⁸ Perlawanan yang dilakukan masyarakat Myanmar sangat lemah dikarenakan Junta Militer terus menghambat kelompok-kelompok yang melakukan penentangan terhadap Junta Militer. Junta Militer menekan keberadaan kelompok tersebut dengan melakukan penangkapan, dan penganiayaan.⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ "PBB Desak Myanmar Akhiri Pelanggaran HAM," dalam

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sejak Junta Militer berkuasa pada 1962, perlawanan tidak hanya sampai pada 8 Agustus 1988 dan kemenangan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada 1990, tetapi pada September 2007 terdapat perlawanan terhadap rezim anti demokrasi di Myanmar tersebut. Demonstrasi tidak hanya dilakukan aktivis dan masyarakat umum namun juga para biksu. Para biksu berusaha berada di bagian depan, seakan berharap pasukan Junta Militer segera melepas kekuasaannya di Myanmar. Namun perlawanan yang dilakukan terhadap Junta Militer sangat lemah. Hal itu dikarenakan Junta Militer melakukan penangkapan dan penganiayaan sehingga perlawanan yang ada tidak dapat menjadi kuat atau besar.

3. Tertutupnya Junta Militer

Konflik internal di Myanmar dari awal negara tersebut berdiri hingga saat ini terus berlangsung. Myanmar merupakan sebuah negara yang dulunya bernama Burma, dimana sejak tahun 1885 kekuasaannya dipegang secara penuh oleh kolonial Inggris. Kemudian, Myanmar dijadikan sebagai sebuah provinsi dari India yang juga mengalami penjajahan dari Inggris.⁷⁰

Pemisahan Myanmar dari India dilakukan oleh Inggris. Pada tahun 1937 dan selama Perang Dunia Kedua, Myanmar yang diduduki oleh Jepang melawan tentara sekutu memperoleh bantuan dari *Burma Independence Army* (BIA) atau Tentara Kemerdekaan Burma yang dilatih oleh tentara Jepang.

⁷⁰ *Ibid.*

Tentara dari BIA yang berada dibawah pimpinan Jenderal Aung San, ayah Aung San Suu Kyi, diubah menjadi tentara pendukung *Anti-Fascist People's Freedom League* (AFPFL), sebuah gerakan perlawanan anti Jepang. Kekuatan koalisi ini didukung oleh kelompok etnis termasuk Karen, pada akhirnya mampu merebut kemerdekaan dari Jepang. Pada Maret 1945 setelah bebas dari tentara Jepang, Aung San mewakili kelompok perlawanan dan pemerintah Inggris di Myanmar menyepakati perjanjian di mana Inggris memberi kemerdekaan kepada Myanmar yang secara efektif pada 4 Januari 1948. Namun sebelum Burma merdeka, Aung San dan enam orang pendiri negeri ini dibunuh pada 19 Juli 1947.⁷¹

Konstitusi Myanmar yang telah merdeka menganut bikameral dengan perdana menteri yang memimpin kabinet. Wilayah yang mayoritas etnik seperti Shan, Kachin, Kayin, Kaya, dan Chin memiliki otonomi sendiri, meskipun tetap mengakui *Union of Burma* yang berpusat di Rangoon. Dari 1948 sampai 1962 pemerintahan sipil Myanmar dilakukan secara demokratis berdasarkan perwakilan rakyat. Konflik internal terus berlangsung di Myanmar berdasar alasan politik, sosial, dan etnik. Pada 1962, pemerintahan sipil pimpinan Perdana Menteri U Nu dikudeta oleh kekuatan militer yang dipimpin Jenderal Ne Win. Selama Ne Win berkuasa konflik internal di Myanmar terus berlangsung.

⁷¹ "Utusan Khusus PBB Akan Diskusikan HAM di Myanmar," dalam

Terjadi perlawanan dari partai Komunis Myanmar dan kelompok-kelompok etnis. Situasi ekonomi Myanmar terus memburuk, meski pemerintah Myanmar telah menasionalisasi beberapa perusahaan asing dan swasta. Negara menuju kepada kebangkrutan. Menurut Ne Win, *The Burmese Way to socialism* merupakan gabungan dari Budhism, Marxism, Xenophobia, Nasionalist dan Megalomania.⁷²

Sangat sulit untuk mengungkapkan kasus pelanggaran HAM di Myanmar karena “mata-mata pemerintah” secara aktif melakukan pengawasan di mana-mana. Pengawasan yang ketat terhadap media massa terus dilakukan Junta Militer. Tertutupnya Junta Militer menyulitkan masyarakat internasional mengetahui kondisi Myanmar yang sebenarnya.

Wartawan, terutama wartawan asing, sulit untuk dapat mencari berita di negara Myanmar yang mendapat julukan sebagai “negara paling tertutup di dunia itu”. Namun, berkat teknologi baru dan kerja keras aktivis, serta orang biasa yang peduli dan berani, pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Junta Militer dapat diungkap. Keberadaan internet, sambungan satelit, dan telepon kamera secara tidak langsung membantu perjuangan para aktivis untuk mengabarkan apa yang sedang terjadi di Myanmar.

Laporan mengenai keadaan di Myanmar di laporkan secara langsung oleh para jurnalis kepada jaringan berita internasional seperti CNN dan BBC. Selain itu, laporan warga juga disebar luaskan oleh *Democratic Voice of Burma* (DVB) yang

⁷² “Penindasan HAM di Myanmar Masih Berlangsung,” dalam <http://burma.kapanlagi.com/h/0000253433.html> diakses tanggal 11 Oktober 2011

berada di Oslo, Norwegia. Jaringan berita yang dijalankan oleh para pelarian Myanmar itu kini menjadi sumber berita bagi jutaan warga Myanmar di luar negeri.

Namun, usaha para aktivis pun secara perlahan mulai mendapatkan pengawasan ketat dari pihak Junta Militer. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Direktur *Desk Asia organisasi Reporters Without Borders*, Junta Militer Myanmar mulai mengetahui cara-cara para aktivis yang menyebarkan berita mengenai keadaan di Myanmar dan berusaha mencegah aliran berita yang disebarluaskan dari dalam negeri. Junta Militer memperlambat koneksi internet dan berusaha mematikan pelayanan telepon seluler yang ditujukan untuk menghalangi upaya-upaya yang dilakukan para aktivis yang melakukan protes dan perlawanan.⁷³

Upaya yang dilakukan Junta Militer Myanmar sudah tidak dapat menghalangi arus informasi dari dalam negeri ke seluruh penjuru dunia sehingga mengakibatkan tidak semua hal yang dilakukan junta militer tidak dapat ditutupi di era informasi ini, termasuk perilaku otoriter Junta Militer.

Meskipun demikian, Junta Militer terus aktif membendunginya. Upaya lain untuk menggagalkan penyebaran informasi terus dilakukan termasuk dengan cara melakukan perusakan kabel bawah air untuk menghentikan jaringan internet. Sebelum melakukan perusakan pada sistem jaringan internet, Junta Militer Myanmar menuduh media asing menerbitkan "kebohongan" soal penumpasan aksi protes anti

⁷³ "Derita Rohingya, Muslim Myanmar Yang Terabaikan," dalam

Junta Militer. Berikut ungkapan salah seorang Junta Militer "Media barat dan media anti pemerintah menyiarkan berita utama untuk menjatuhkan kredibilitas Junta Militer. Hal itu menyebabkan kami dituntut untuk bertindak tegas".⁷⁴

Selain melakukan upaya melumpuhkan jaringan internet, sejumlah media cetak juga ikut diberangus dan dihentikan peredarannya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menghentikan seluruh informasi soal aksi protes di Burma tidak saja bagi dunia luar, tetapi juga di dalam negeri. Tidak hanya itu, warung internet yang ada dan beroperasi di Rangoon juga diberangus oleh para Junta Militer. Junta Militer melakukan penyerbuan terhadap Myanmar *Info-Tech*, yang banyak memasok foto dan video soal aksi protes yang berlangsung di Myanmar.

Pemberangusan ini diharapkan oleh para anggota Junta Militer dapat menghentikan pengiriman foto dan video oleh wartawan, aktivis, dan *bloger* ke luar Myanmar semakin berkurang atau bahkan berhenti.

Tekanan yang dilakukan oleh para Junta Militer tidak hanya terhadap keberadaan warung internet dan beberapa media komunikasi, tetapi juga dilakukan oleh para Junta Militer terhadap penerbit surat kabar swasta. Media massa dipaksa tutup karena menolak menyiarkan propaganda militer, selain itu, sembilan surat kabar mingguan yang ada di Rangoon pun ditutup.⁷⁵

Hal tersebut tidak hanya dikarenakan paksaan yang dilakukan oleh Junta Militer, tetapi juga karena jaringan distribusi yang lumpuh akibat kerusakan yang

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Tamara*, "Tekanan yang Dilakukan Junta Militer di Myanmar", 18 November 2007.

terjadi. Belum merasa cukup dengan semua usaha yang dilakukan, Junta Militer Myanmar terus melakukan tekanan. Selain merusak jaringan dan penyediaan warung internet, Junta Milliter juga memberikan perintah secara khusus terhadap para tentara untuk memukul dan merampas siapa saja yang membawa kamera video atau telepon seluler (ponsel) berkamera di tengah aksi brutal tentara yang melakukan penghalauan terhadap para pemrotes.

Wartawan kantor berita APF Jepang, Kenji Nagai, yang tewas saat mengambil gambar aksi brutal Junta Militer merupakan korban dari sikap militer yang mendapat perintah khusus untuk memukul siapa saja yang membawa kamera video. Nagai, wartawan yang bekebangsaan Jepang, tewas dengan luka tembak menembus bagian bawah dada. Nagai sedang menenteng kamera video pada saat ditembak.

Pada 1987, ekonomi Myanmar mengalami kemiskinan. Nilai mata uang Myanmar jatuh, banyak tabungan masyarakat di bank dihapus. Myanmar yang sebelumnya memiliki tingkat kesejahteraan di Asia berada di bawah Jepang, antara lain karena menjadi negara pengekspor beras terbesar sedunia, jatuh menjadi negara termiskin dan terkorup di dunia.

Konflik internal di Myanmar berlanjut dengan munculnya aksi-aksi demonstrasi menentang pemerintahan Myanmar. Militer Myanmar kemudian membentuk SLORC (*State Law and Order Restoration Council*). SLORC memerintah dengan darurat militer dan terus mematahkan gerakan anti pemerintah militer. Pada tahun 1989 Junta Militer mengganti nama negara Burma menjadi

Myanmar. SLORC menyetujui pemilihan umum dengan multi partai. Maka pada 27 Mei 1990 digelar pemilu untuk memilih anggota parlemen. Liga Nasional untuk Demokrasi (*the National League for Democracy* atau NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi dalam pemilu tersebut menang 80% suara.⁷⁶

SLORC akhirnya tidak mengakui hasil pemilu, bahkan menangkapi para anggota parlemen terpilih dan memenjarakannya. SLORC juga mengisolasi Aung San Suu Kyi dengan menahannya di rumah, serta menekan semua gerakan pro-demokrasi baik di kampus maupun di luar kampus. Kebebasan pers, berkumpul dan berpendapat dibatasi.

Pada 1997 SLORC mengubah nama menjadi SPDC (*State Peace and Development Council*). SPDC terdiri dari 19 jenderal, termasuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara, dengan empat jenderal Angkatan Darat yang menjadi pengendali utama. Than Swee sejak 1992 menjadi jenderal senior yang merupakan pemimpin Junta Militer Burma. Sejak 1988 sampai 2007, kekuatan militer meningkat dari 200.000 personel menjadi 480.000 personel.

SPDC meskipun mulai membuka diri terhadap orang asing antara lain dengan mengundang wisatawan dan investor namun hasilnya hanya untuk kepentingan militer semata. Kondisi ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat Myanmar tidak mengalami peningkatan. Dua lembaga bisnis yang berkuasa adalah *Union of*

⁷⁶ "Parlemen Serukan Penghentian Pelanggaran HAM di Myanmar," dalam <http://www.antara.co.id/arc/2007/10/11/parlemen-serukan-penghentian-pelanggaran-ham-di-myanmar/>, diakses tanggal 11 Oktober 2011.

*Myanmar Economic Holding (UMEH) dan the Myanmar Economic Corporation (MEC).*⁷⁷

Bisnis yang seluruhnya dikuasai militer itu bergerak di bidang perhotelan, pariwisata, migas, batu mulia, perbankan, perkapalan, real estate dan kehutanan. Beberapa negara yang menjadi pendukung Junta Militer adalah China, India dan Rusia. Selain itu banyak perusahaan berinvestasi di sana terutama dari Thailand, Singapura, bahkan dari Perancis.

Untuk menjelaskan bahwa bisnis Junta Militer hanya untuk kepentingan militer maka dapat dilihat pada data-data anggaran yang dikeluarkan Myanmar untuk berbagai bidang. Anggaran militer berkisar antara 30-50%. Kesehatan 3%, pendidikan 8%. Pada 1990-1999 Myanmar menempati urutan lima terbawah dari 128 negara sebagai negara termiskin yang mengalokasikan 3% dari GDP untuk pendidikan. Namun pada 1990 hingga 2000 menyusut menjadi 0,3% dari GDP untuk pendidikan. WHO menempatkan Myanmar sebagai negara terburuk kedua setelah Sierra Leone dari 191 negara.⁷⁸

UNICEF mencatat 36% anak di bawah 5 tahun menderita kurang makan. HIV/AIDS menjadi ancaman serius, UNAIDS melaporkan rata-rata HIV infeksi di Burma adalah 1,3% bahkan survei lain mencatat 3,46%. UNDP mencatat 75% populasi rakyat Myanmar hidup di bawah garis kemiskinan dengan estimasi GDP

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ "Praktisi Falun Gong dianiaya sampai Meninggal." dalam

US\$ 74,3 miliar dan GDP per kapita US\$ 1.700. Pada 2003 GDP Myanmar lebih rendah dari Bangladesh, Laos, Thailand dan Malaysia. Inflasi pada tahun yang sama 49,7%, ini menempatkan Myanmar menjadi negara kedua tertinggi inflasinya dari 176 negara.

Di samping masalah-masalah di atas, Myanmar juga negara yang dikecam dunia karena menggunakan anak di bawah umur untuk tentara, penerapan kerja paksa, pelegalan narkoba, serta menekan etnis minoritas. Junta Militer semakin berkuasa sejak "mencampakkan" hasil pemilu pada 1990. Junta Militer selanjutnya menekan perkembangan pendidikan di negaranya dengan menutup universitas yang dianggap pusat gerakan mahasiswa sejak 1988. Hanya universitas yang berbubungan langsung dengan Junta Militer yang masih dibuka.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa tertutupnya Junta Militer menyulitkan masyarakat internasional mengetahui kondisi Myanmar yang sebenarnya. Junta Militer sengaja menutup akses informasi sehingga pelanggaran-pelanggaran HAM yang telah dilakukannya tidak dapat terpublikasikan. Kondisi ini